

Kebijakan Luar Negeri *U-turn* Yordania Terhadap Suriah Pasca-Perang Melawan Terorisme

Dyah Purbo Arum Larasati

Pendiri Ruang Studi Terorisme @noheroescape

Alumni Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

e-mail : dyahpurboarum@gmail.com

Abstract

Jordan is one of the Arab countries that played an essential role in the war in Syria. The battle began with anti-government demonstrations in Syria in 2011, then turned into an armed conflict after forming armed militias affiliated with Al Qaeda, and continued with the establishment of ISIS in 2013. Currently, Syria has won the war against terrorism, although terrorist militias still control a relatively small area in Syria. Since 2021, Arab countries that initially supported armed militias have taken foreign policy's u-turn, namely returning to normalization efforts with Syria. This study aims to explain the reasons for the normalization of diplomatic relations carried out by Jordan towards Syria. This study uses Robert D. Putnam's two-level games theory and is carried out qualitatively by collecting data through literature studies and interviews with humanitarian activists in Syria. This study finds that Jordan's foreign policy's u-turn towards Syria has two goals. First, it wants to improve its domestic problems, namely the economic downturn, one of which occurred due to the influx of refugees, security issues, water availability. Second, Jordan wants to achieve international targets, whereas Jordan, a Western ally, wants to reduce Iran's influence in the Middle East region.

Keywords: *foreign policy u-turn, Jordan, Syria, terrorism, two level games theory.*

Abstrak

Yordania merupakan salah satu negara Arab yang berperan penting dalam perang di Suriah. Perang tersebut berawal dari aksi-aksi demo antipemerintah Suriah pada tahun 2011, lalu berubah menjadi konflik bersenjata setelah terbentuknya milisi-milisi bersenjata yang berafiliasi dengan Al Qaida; dan berlanjut dengan terbentuknya ISIS pada tahun 2013. Saat ini Suriah telah berhasil memenangkan peperangan melawan terorisme tersebut, meskipun

sebagian kecil wilayah di Suriah masih dikuasai milisi-milisi teroris. Sejak tahun 2021, negara-negara Arab yang semula memberikan dukungan kepada milisi bersenjata terlihat memutar balik (*u-turn*) kebijakan luar negerinya, yaitu kembali melakukan upaya normalisasi dengan Suriah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan normalisasi hubungan diplomasi yang dilakukan Yordania terhadap Suriah. Penelitian ini menggunakan teori *two level games* Robert D. Putnam dan dilakukan dengan kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui studi literatur dan wawancara dengan aktivis kemanusiaan di Suriah. Temuan penelitian ini adalah bahwa keputusan Yordania untuk memutar balik kebijakan luar negerinya terhadap Suriah memiliki dua tujuan. Pertama, Yordania ingin memperbaiki masalah domestiknya, yaitu keterpurukan ekonomi, yang salah satunya terjadi akibat derasnya pengungsi; masalah keamanan; ketersediaan air. Kedua, Yordania ingin mencapai target internasional, dimana Yordania yang merupakan aliansi Barat ingin mengurangi pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah.

Kata Kunci: kebijakan luar negeri *u-turn*, Suriah, teori *two level games*, terorisme, Yordania.

Pendahuluan

Konflik di Suriah dimulai dengan aksi-aksi demo menuntut demokratisasi pada tahun 2011 dan kemudian berubah menjadi konflik bersenjata pada tahun 2012, yaitu ketika kelompok-kelompok oposisi memutuskan untuk angkat senjata. Kelompok-kelompok ini mendapatkan bantuan dari negara-negara NATO, terutama Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Turki. Keterlibatan NATO di Suriah ini dapat dikalkulasikan sebagai bentuk strategi militer dan intelijen dengan tujuan mendominasi Timur Tengah. Turki membantu ribuan petempur *Free Syrian Arab Army* (Rozoff, 2012). Prancis juga secara resmi mengakui telah memberikan bantuan militer 'tidak mematikan' (*non-lethal military aid*) kepada milisi pemberontak (Al Arabiya, 2012). Di sisi lain, campur tangan Israel juga tidak dapat diabaikan dalam perang Suriah, meski posisinya baru diketahui di sekitar tahun 2012 (Williams, 2012). Begitu juga dengan CIA dan Mossad, yang semakin membawa dampak buruk bagi keterbelakangan negara Suriah hingga satu dekade ini (Ignatius, 2012).

Selain negara NATO, negara-negara Arab Teluk juga berperan penting dalam Perang Suriah, antara lain Yordania. Keterlibatan Yordania mulai terdeteksi oleh media pada Desember 2011. Saat itu, ketika perang di Irak mulai mereda, media *mainstream* memberitakan bahwa tentara Amerika Serikat yang ditugaskan di Irak akan ditarik

pulang dan dikirim ke tanah airnya. Namun, media alternatif memberitakan hal sebaliknya, tentara AS ini justru dipindahkan ke Yordania, tepatnya di kawasan Pangkalan Udara King Hussein di Al Mafraq. Al Mafraq merupakan sebuah daerah perbatasan di Yordania, berjarak kurang lebih 10 kilometer dari Suriah. Al Mafraq pernah menjadi *basecamp* upaya penggulingan pemerintah sah Suriah oleh Yordania, Inggris, dan Israel, yakni Presiden Nureddin Al Attasi, pada tahun 1960-an. Selain itu, di Yordania, tepatnya di sebelah barat kota Salt, terdapat juga pembangunan kamp militer lainnya, ditujukan untuk menampung para serdadu Suriah yang membelot pasca Arab Spring (Sulaeman, 2017).

Peran Yordania dalam membantu kelompok-kelompok bersenjata di Suriah juga diungkapkan oleh media terkemuka Amerika Serikat, The New York Times (NYT). Menurut NYT, sejak 2012, Direktur CIA, David H. Petraeus, telah mengusulkan program rahasia untuk mempersenjatai dan melatih milisi pemberontak. Awalnya Presiden Obama menolak, namun akhirnya menyetujuinya, tepatnya setelah dilaksanakannya lobi yang intens dari Raja Abdullah II (Yordania) dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu (Israel). NYT melaporkan bahwa pusat pelatihan para pemberontak ini ada di Yordania dan Turki (Mazzetti, Goldman, & Schmidt, 2017). Akibat peran Yordania dalam membantu penggulingan rezim di Suriah, hubungan diplomatik kedua negara menjadi sangat memburuk.

Namun, pada tahun 2021, Yordania tiba-tiba memutuskan untuk kembali menormalisasi hubungannya dengan Suriah. Fenomena inilah yang menjadi fokus penelitian di artikel ini. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif berbasis studi pustaka dan wawancara dengan seorang *humanitarian activist* asal Prancis, Pierre Le Corf, yang beraktivitas di Suriah selama masa perang hingga kini. Penelitian ini juga menggunakan teori *two level games* oleh Robert D. Putnam, untuk menganalisis alasan Yordania menormalisasi hubungan diplomatiknya terhadap Suriah. Dalam hal ini, penulis mengupas tekanan-tekanan yang dihadapi Yordania baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai kunci variabel dari penggunaan teori *two level games*. Penulis juga akan menjelaskan indikasi keterlibatan pengaruh asing dalam persetujuan kerjasama kedua negara tersebut.

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penulisan artikel ini, yaitu Henkel (2020), meneliti kesulitan negara-negara Arab dalam menormalisasi hubungan terhadap Suriah di masa Bashar al-Assad. Dalam penelitiannya, Henkel menemukan bahwa normalisasi hubungan bilateral negara-negara Arab terhadap Suriah menjadi tren atas dasar kepentingan nasional mereka masing-masing, contohnya Yordania dan Lebanon yang terpuruk akibat desakan ekonomi dan derasnya isu pengungsi. Meski begitu, Henkel juga menemukan bahwa

penting bagi Amerika dan negara-negara Eropa untuk mempertimbangkan kebijakan mereka, terutama dalam mengisolasi Suriah melalui tekanan ekonomi dan politik. Hal ini ditekankan Henkel bahwa kekacauan dalam negeri Yordania dan Lebanon (sebagai aliansi Barat) turut berdampak pada kekuasaan geopolitik Barat, terlebih Moscow yang memiliki kepentingan di Timur Tengah semakin diwaspadai. Selain itu, penulis juga merujuk pada artikel Krasna (2021), menemukan bahwa normalisasi bilateral Yordania terhadap Suriah terjadi menimbang rapuhnya ekonomi di Yordania, derasnya arus pengungsi, kurangnya persediaan air, dan rentannya keamanan perbatasan, serta kepentingan Raja dalam mengembalikan nama baiknya di hadapan masyarakat. Sementara itu, Saukani (2020), menemukan bahwa kerajaan monarki Yordania dipengaruhi oleh tren nasionalisme dalam sistem kebijakan luar negerinya, yaitu terdapatnya kecenderungan dalam membangun hubungan yang erat di antara para suku, negara, militer, dan rezim Hashemite.

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis kebijakan *U-turn* (putar balik) luar negeri Yordania dalam menormalisasi hubungannya terhadap Suriah dengan menggunakan teori *two level games* oleh Robert D. Putnam, terutama pasca Suriah berhasil memerangi terorisme di wilayah kedaulatannya. Pembahasan selanjutnya akan dibagi dalam beberapa sub judul, yaitu krisis dan teori *two level games*, ketahanan Suriah dalam perang melawan terorisme, kepentingan nasional Yordania dalam kerangka normalisasi, strategi Yordania menyeimbangkan tekanan dalam dan luar negeri, hasil kebijakan luar negeri Yordania terhadap Suriah, dan simpulan.

Krisis dan Teori *Two Level Games*

Kata "krisis" dapat merujuk pada keadaan yang memaksa seseorang atau suatu aktor untuk mengeluarkan keputusan krusial. Dalam studi Hubungan Internasional, krisis dikalkulasikan sebagai periode singkat ketika seseorang atau sejumlah kelompok dihadapkan pada sebuah konflik yang dipandang sebagai ancaman besar. Krisis tersebut dianggap mampu mengganggu kepentingan vitalnya, dan dalam waktu singkat membutuhkan reaksi untuk bertindak. Dalam keadaan ini, krisis atau konflik dapat meningkat eskalasinya menjadi perang, atau perang sendiri kemudian dapat dihindari dengan sejumlah kesepakatan, sehingga status *quo ante* dapat diletakkan kembali (Griffiths, et al., 2002).

Pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara di masa krisis sangat penting untuk dipertimbangkan. Sehubungan dengan ini, teori *two level games* oleh Robert D. Putnam merujuk pada seberapa besar pengaruh dan strategi suatu negara ketika bermain di dua level, yaitu di tingkat internasional (level pertama), serta di tingkat

domestik (level kedua). Kedua level tersebut akan mendesak negara yang tengah berada dalam krisis untuk berpikir cerdas dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang akan menjadi *winsets* negara tersebut. *Winset* diartikan sebagai hasil yang kemungkinan besar dapat diterima oleh kelompok kepentingan domestik yang nantinya akan diratifikasi sebagai peraturan/perundang-undangan, atau kelompok domestik tersebut juga dapat memberikan beberapa bentuk dukungan pemerintah lainnya. *Winsets* ini dapat diteliti dari sejumlah faktor, yaitu preferensi atau koalisi, kelembagaan pemerintah, serta strategi negosiasi (Anggorono, 2018).

Two level games menjelaskan, bahwa di level nasional akan terdapat kelompok-kelompok domestik yang menuntut kepentingan mereka, dengan berusaha menekan para pembuat kebijakan atau pemerintah untuk memutuskan kebijakan yang mereka kehendaki. Sementara itu, pemerintah akan terdorong membangun koalisi di antara kelompok-kelompok tersebut. Sedangkan di level internasional, pemerintahan nasional akan memaksimalkan kemampuan mereka demi memenuhi tekanan domestiknya, serta meminimalisir konsekuensi buruk yang telah dan akan terjadi di level internasional. Pada intinya, tidak akan ada satu atau dua permainan dalam konsep ini yang akan diabaikan oleh para pembuat keputusan pusat, terutama selama negara yang terlibat saling bergantung namun tetap berdaulat (Putnam, 1988: 434).

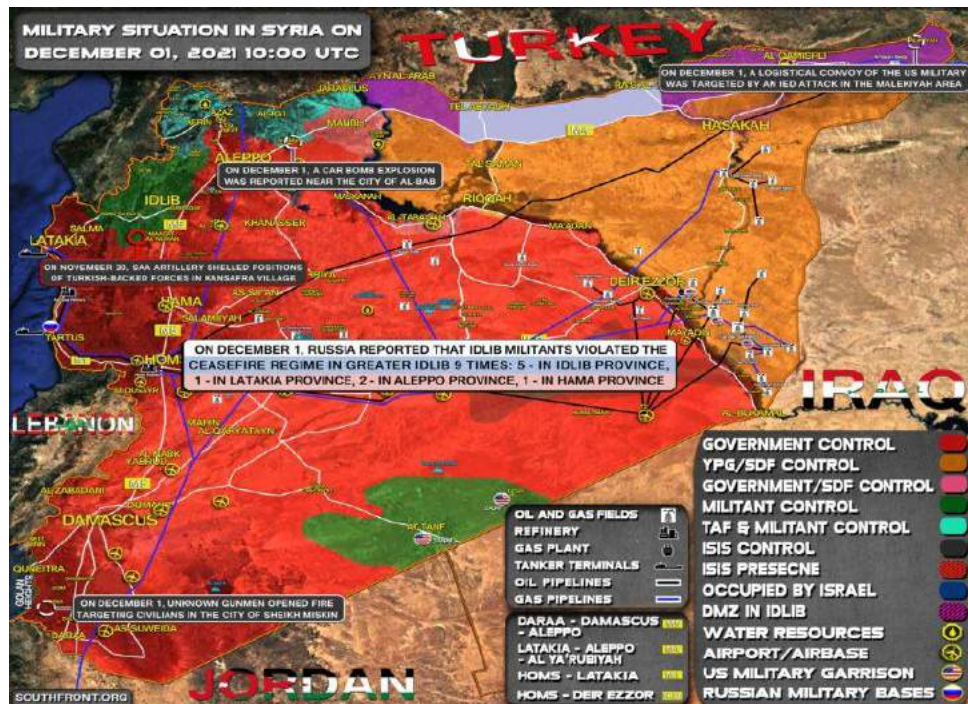
Dasar teori *two level games* adalah untuk menjelaskan aktor-aktor yang terlibat di meja negosiasi, terutama ketika kebijakan politik luar negeri masing-masing pemerintah nasional tersebut dirumuskan. Namun pada kesempatan ini, penulis juga akan menjelaskan tentang keterlibatan negara lain (*power* yang tidak ikut secara langsung di meja negosiasi) namun mampu mempengaruhi satu atau dua pemerintah nasional tersebut dalam memutuskan tahap-tahap kebijakannya. Selain itu, meski dalam *two level games* harus menjelaskan koalisi dan kelembagaan pemerintah, namun penulis akan lebih menekankan tentang kekacauan di tubuh dalam negeri Yordania, yang dalam hal ini tersebar di beberapa bidang masalah, serta dominasi dalam struktur pemerintahan kerajaan monarki. Penulis juga akan menganalisis faksi umum yang dominan tersebar di Yordania, bersamaan dengan kecenderungan suara mereka yang terbatas. Hal ini penulis tujukan sebagai preferensi atas tekanan domestik, yang nantinya akan menjadi alasan bagi pemerintah Yordania untuk menyeimbangkan strategi kebijakannya di dua level.

Ketahanan Suriah dalam Perang Melawan Terorisme

Kondisi yang dialami Suriah hampir sama dengan yang dialami Irak ketika Saddam Husein memerintah. Dimana ketika *power* aliansi Barat mulai melemah, dan para petempur nyaris kalah di medan perang, maka salah satu pilihan sebelum dijatuhkannya sanksi koersif, ialah Barat bersama koalisi akan menyebarkan disinformasi global. Disinformasi ini menyatakan bahwa Suriah telah memperkaya *arsenal weapons*-nya. Media-media *mainstream* yang memakai prinsip Pentagon tersebut cepat dalam memberi dakwaan pada pengeboman gedung sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum yang dilakukan oleh pemerintah Suriah. Namun, ketika teroris yang mengaku 'berjihad' datang menumpahkan darah, media-media tersebut justru memilih diam (Bartlett, 2021). Meski begitu, ketika tahun demi tahun berganti, ketahanan rakyat serta pemerintah Suriah tetap ada, diiringi dengan bantuan kelompok aliansi seperti Iran, Hezbollah, dan Rusia. Sejak 2019 sebagian besar wilayah di Suriah telah dibebaskan oleh pemerintah. Namun masih ada sejumlah kawasan yang diduduki kelompok militan.

Sejumlah wilayah yang masih dalam upaya liberalisasi dari kelompok militan sampai hari ini di antaranya adalah Dara al-Balad (Dabin, 2021), Homs, Deir-Ezzor, Lattakia, Aleppo, Hama, Idlib, Raqqa, dan Hasakah, dengan khususnya sejumlah kota yang berada di dalam provinsi itu seperti Hariyah *town*, Musawara *village*, Ras al-Ain, Ablin, Azaz *city*, Kobane, al-Resafa, al-Tanf, kota tua bersejarah Palmyra, Arihah, Tell Abyad, Kah, dan kota Mashon (Southfront, 2021).

Kebanyakan wilayah yang belum diliberalisasi tersebut masih terkepung dan dikuasai oleh kelompok kepentingan, seperti ISIS, Hay'at Tahrir al-Sham, kelompok Kurdi, tentara Turki, dan militer Israel. Lebih jelas, peta front perang Suriah terbaru 1 Desember 2021 dapat diteliti pada gambar di bawah ini. Terdapat beberapa simbol di dalam peta, di antaranya menunjukkan nama penguasa wilayah sesuai warna kotak petunjuk tersedia, serta bentuk sumber daya alam apa yang tumbuh di sekitar wilayah tersebut.



Sumber: Southfront.org, 2021

Selain harus berperang melawan milisi-milisi bersenjata, Suriah berjuang menghadapi sanksi unilateral yang dijatuhkan Barat sejak 2011. Sejak tahun 2019, AS memberlakukan embargo yang disebut *Caesar Syria Civilian Protection Act* (disingkat *Caesar Act*). Sanksi di bawah *Caesar Act* menargetkan orang asing yang memfasilitasi akuisisi barang, jasa, atau teknologi rezim Assad yang mendukung aktivitas militer rezim serta industri penerbangan dan produksi minyak dan gasnya. *Caesar Act* juga memberikan sanksi bagi mereka yang mengambil keuntungan dari konflik Suriah dengan terlibat dalam kegiatan rekonstruksi di negara tersebut. AS mengklaim bahwa sanksi ini tidak dimaksudkan untuk menyakiti rakyat Suriah, melainkan untuk meningkatkan akuntabilitas Assad atas kekerasan yang dilakukannya (*to promote accountability for the Assad regime's violence*) (state.gov, 2019).

Namun realitasnya, implementasi *Caesar Act* semakin merintang Suriah keluar dari krisis panjang, akibat gempuran terorisme yang terjadi selama ini. *Caesar Act* tidak hanya menyerang pemerintah Assad, namun menyerang sebuah negara berdaulat beserta seluruh rakyatnya. Sanksi ini dijatuhkan Barat untuk menghindari usaha-usaha Suriah dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar (*basic services*), seperti makanan, minuman, air bersih, listrik, bahan bakar, obat-obatan, hingga pendapatan, dan lapangan pekerjaan. Di awal tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 mulai menyebar,

Suriah harus menghadapinya dalam kondisi belum lepas dari *Caesar Act* (Beeley, 2020). Kondisi tersebut mendorong penulis untuk terhubung dengan seorang *humanitarian activist* asal Prancis Pierre Le Corf, yang kini tinggal di Aleppo. Percakapan penulis dengan Pierre Le Corf, 2020:

"... I try to deal with all of that. Here is been quite heavy because of sanctions, because I am in Syria, and that's really really really really heavy because you know because I am trying to help, but they just shoot me in the legs at the two or three months or something. And inside the country is same you know. Like in Syria I have so many people who appreciate what I do, but if I have to go in the side of the cafe and for the example like some people, like people in Syria some of them, they think that I am a spy. I am a spy for France for example. And French think I am a spy for Syria, and terrorist thinks I am a spy for Russia. So (laugh) it's quite crazy, because everything that I am trying to do basically it's always like a ... around the ... a like a ...and around a... suspicion and it's really hard because they make everything hard."

Penjelasan Le Corf ini sealur dengan yang diberitakan SANA atau *Syrian Arab News Agency* (Mousa, 2014), bahwa perang satu dekade Suriah selain membawa kerugian materiil juga menimbulkan beban psikologis. Hal ini mendesak beberapa pihak nasional maupun internasional untuk mencetuskan program bantuan psikologis kepada warga terdampak perang. Kondisi sulit ini membuat pemerintahan Assad menyambut baik pendekatan yang dilakukan oleh negara-negara Arab, termasuk Yordania.

Kepentingan Nasional Yordania dalam Kerangka Normalisasi

Yordania merupakan negara yang sangat terbuka terhadap gelombang pengungsi yang datang ke wilayahnya. Namun pada dasarnya, Yordania juga telah lama menghadapi krisis di berbagai bidang. Hal ini dapat diteliti dalam isu meluasnya tekanan domestik dan ketidakstabilan regional. Misalnya pada Juni 2021 lalu (Arraf, 2021), terjadi kasus penangkapan dan penyidikan terhadap tiga figur ternama yang dekat dengan keluarga kerajaan.

Hal di atas masih merupakan satu dari ragam masalah domestik Yordania. Di sisi lain, keberlangsungan perang di negara tetangga seperti Irak dan Suriah turut mempengaruhi ekonomi negara ini. Sama halnya dengan perang Palestina-Israel yang secara langsung membuat Yordania tersudut di antara konflik tetangga dan aliansinya (Awadallah, 2015). Adapun dalam isu pengungsi, kebijakan Yordania telah menjadi bumerang tersendiri bagi perekonomian negara tersebut. Akibat masalah pengungsi ini,

tidak sedikit juga terjadi benturan sosial antara pengungsi yang masuk ke wilayah Yordania dengan masyarakat asli/ lokal di sana (Sweis, 2021).

Contoh lain dari beban yang dipikul Yordania akibat pengungsi dapat dicermati dalam upaya Kementerian Pendidikan Yordania, yaitu yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan pengungsi, merekrut guru, dan memberlakukan sistem pendaftaran gratis terhadap anak-anak pengungsi Suriah (Human Right Watch, 2016). Dengan jumlah pengungsi Suriah yang bermukim di Yordania saat ini mencapai $\pm 1,3$ juta jiwa (Ersan, 2021), serta jumlah total rakyat Yordania mencapai ± 10 juta jiwa (World Population Review, 2021), hal ini membuat Yordania sangat terbebani dalam hal ekonomi.

Tingginya jumlah pengungsi di Amman juga membuat pasokan air di negara ini semakin menipis. Yordania dikategorikan sebagai negara kedua terkering di dunia dengan sumber daya air per tahun kurang dari 80 meter kubik per orang. Angka yang sangat jauh dari batas normal internasional yang seharusnya, yaitu 500 meter kubik per orang (The Free Press Journal, 2021). Oleh karena itu, dampak negatif akibat pengungsi ini menjadi alasan bagi Yordania sejak tahun 2015 menutup jalur perbatasannya dengan Suriah. Penutupan jalur perbatasan tersebut juga semakin bulat menimbang semakin meningkatnya para petempur asing yang mengusik keamanan Yordania (Ersan, 2021). Misalnya, dalam isu keamanan ini dapat disinggung ke kasus pembunuhan pilot Yordania Muath al-Kasasbeh oleh ISIS pada 2015 lalu (Kilani, 2021).

Di sisi lain, penutupan jalur perbatasan Yordania–Suriah membuat masyarakat kehilangan mata pencaharian, sehingga mendorong meletusnya protes-protes sipil di Yordania. Hal ini mengingatkan penduduk Yordania yang sebelum perang Suriah mayoritas mengandalkan profesi dagang di jalur perbatasan Suriah, salah satunya di wilayah sekitar perbatasan Daraa dan Ramtha (Tokmajyan, 2021). Di samping itu, sejak perang Suriah dimulai tahun 2011, neraca perdagangan Yordania ikut terjun bebas, dari angka \$615M menjadi \$94M (*Department of Statistic, 2020*). Berdasarkan keterpurukan yang dialami Yordania ini, hal-hal tersebut menjadi pertimbangan kerajaan untuk terus bertungkus-lumus memperbaiki ekonomi domestik yang kendur. Dalam pandangan penulis, kondisi domestik inilah yang mendorong Yordania untuk menormalisasi hubungan diplomatiknya terhadap Suriah.

Strategi Yordania Menyeimbangkan Tekanan Dalam dan Luar Negeri

Analisis Asharq Al-Awsat (2021), menyebutkan bahwa dokumen dan sejumlah lampiran rahasia telah dikeluarkan oleh pemerintah Yordania, yaitu sebagai upaya Yordania menormalisasi hubungan diplomatik terhadap Suriah. Hasil analisis Al-Awsat

ini juga dikutip Sharif (2021a) yang mengemukakan bahwa AS mendukung strategi Amman tersebut dengan mengusulkan sejumlah langkah bertahap dengan tujuannya untuk mengubah perilaku (*behavior*) dari rezim Assad. Hal ini ditekankan Yordania terhadap Amerika mengingat kegagalan mereka selama sepuluh tahun terakhir dalam menjatuhkan rezim Assad.

Adapun lebih jelasnya, urgensi dari dokumen yang dianalisis Asharq Al-Awsat (2021) tersebut membahas:

1. Pertama, Amerika dan tentara koalisinya yang berada di timur laut Suriah dan di markas militer Al-Tanf dekat perbatasan Irak-Yordania akan keluar. Hal ini nantinya sejalan dengan upaya yang mesti dipenuhi pemerintah Suriah, yaitu mengurangi pengaruh Iran di negaranya. Meski demikian, dokumen tersebut menyebut akan tetap melegitimasi kepentingan Rusia di Suriah.
2. Kedua, berisi revisi yang membahas kebijakan negara Arab dalam upaya meruntuhkan rezim Suriah di masa lalu (*regime change*), kini diganti menjadi harapan mereka bahwa perilaku rezim Suriah akan berubah secara bertahap (*a gradual change in the behavior of the Syrian regime*). Hal tersebut dilakukan negara-negara Arab dan aliansinya dengan mempertimbangkan kegagalan kebijakan mereka selama sepuluh tahun di Suriah.

Dokumen ini juga mengusulkan sebuah pendekatan baru yang akan dikerjakan oleh pemerintah Yordania dengan meminta kerjasama di pihak Suriah, yaitu berfokus untuk memunculkan solusi politik di Suriah, mengakhiri krisis kemanusiaan, serta implikasinya terhadap stabilitas keamanan di negara tersebut maupun di kawasan regional. Utamanya, dokumen tersebut menggarisbawahi pentingnya menumpas terorisme, mengakhiri kegiatan penyelundupan obat-obatan di jalur perbatasan, dan membatasi pengaruh Iran. Terdapat sejumlah *winsets* yang disebutkan oleh Yordania dalam strategi negosiasi di level internasionalnya ini, yaitu, jika pemerintah Suriah mendukung proposal tersebut, mereka akan mendapat insentif. Insentif ini direfleksikan sebagai nilai positif atas upaya Suriah menyejahterakan masyarakatnya, di antaranya dapat mendorong kembalinya pengungsi, yaitu masyarakat Suriah yang masih terlantar akibat perang di berbagai negara, serta agar dapat dijadikan alasan bagi negara-negara Arab untuk menerima kembali Suriah di Liga Arab (Asharq Al-Awsat, 2021).

Yordania telah menetapkan lima langkah utama yang akan direalisasikan guna meningkatkan kerjasamanya dengan Suriah, di samping dalam kerangka memperbaiki problematika domestiknya. Lima langkah tersebut, yang sebagiannya sudah diimplementasikan, adalah mengembangkan pendekatan bertahap sebagai bentuk solusi politik yang berdasarkan Resolusi UNSC 2254, mengumpulkan dukungan dari

kawasan regional dan internasional, meminta persetujuan Rusia dalam pendekatan yang dibuat, memutuskan mekanisme untuk melibatkan rezim Suriah, dan yang terakhir berupa implementasi penuh Resolusi DK PBB 2254 (Asharq Al-Awsat, 2021). Dewan Keamanan PBB menyebutkan bahwa Resolusi 2254 disepakati sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah dan rakyat Suriah agar dapat mengatur negara mereka sendiri tanpa campur tangan aktor lain, serta menghentikan segala bentuk terorisme (United Nations, 2015).

Sejalan dengan dokumen yang diungkapkan oleh Asharq Al-Awsat, Sanchez (2021) menyatakan bahwa Yordania menginisiasi kerjasama saluran pipa gas Arab ditujukan sebagai salah satu cara untuk mengurangi pengaruh Iran di Suriah dan kawasan regional, di samping untuk memperoleh profit dari rekonstruksi yang akan dibangun Yordania bersama sejumlah negara Arab yang terlibat dalam kerjasama pipa gas tersebut. Selain itu, proyek ini juga diharapkan dapat membantu Lebanon keluar dari krisis ekonominya dan mengakhiri ketergantungan minyak dan gas yang didatangkan Hezbollah dari Iran. Harapan negara Arab ini juga merupakan harapan Barat sebagai aliansi, yaitu seperti yang dipaparkan Heller (2021), bahwa Amerika akan menopang kerjasama pipa gas demi membantu ekonomi Lebanon lepas dari pengaruh Hezbollah. Hal ini akan dilakukan Amerika dengan memberikan dukungannya kepada World Bank.

Kerjasama di bidang ekonomi dalam pembangunan pipa gas Arab jika dianalisis juga termasuk strategi Yordania di level internasional. Kerjasama ini mengatur pengiriman gas Mesir ke Lebanon melalui teritorial Yordania dan Suriah. Pembicaraan mengenai hal ini dilakukan dalam pertemuan tingkat tinggi regional yang berhasil menghadirkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral keempat negara. Khususnya bagi Suriah, inilah pertemuan tingkat tinggi regional pertama kalinya sejak perang dimulai. Sharif (2021b) menyebutkan, dalam level selanjutnya keempat negara sepakat untuk mengirim listrik Yordania ke Lebanon melalui wilayah Suriah. Menteri Perminyakan dan Sumber Daya Mineral Suriah, Bassam Tohme mengatakan, kerjasama ini akan menguntungkan negaranya, sebab Suriah akan mendapat bagian gas sesuai kesepakatan. Gas tersebut nantinya akan digunakan Suriah sebagai pembangkit listrik.

Kerjasama ekonomi yang melibatkan keputusan Raja Yordania Abdullah II dan pemerintahan Assad ini telah mendapat jaminan dari Washington, bahwa Yordania tidak akan dijatuhi sanksi seperti *Caesar Act*. Begitu juga dengan Mesir yang tergabung dalam kerjasama pipa gas tersebut (Sharif, 2021b). Hal ini jika dianalisis kembali, sangat bertalian dengan persetujuan Washington terhadap berdirinya kerjasama ekonomi tersebut, yaitu dilansir Lister (2021), bahwa Kedutaan Besar Amerika di Beirut memberi peluang serta menjadi peran kunci atas munculnya kerjasama pipa gas.

Dukungan Amerika dalam kerjasama ini dicermati bertolak belakang dengan pernyataan Joe Biden pada Juli lalu, yaitu saat bertemu Raja Abdullah di Washington. Biden mengatakan bahwa Amerika tidak akan mengakui kepemimpinan Assad, hingga terjadi perubahan politik di Suriah. Meski begitu Biden juga berkata, bahwa Amerika tidak akan menghalangi maupun mendorong negara lain untuk menormalisasi hubungannya dengan Suriah (Haboush, 2021).

Keseriusan Yordania menormalisasi hubungannya terhadap Suriah demi menyelesaikan masalah domestik juga tampak dari semakin meningkatnya intensitas pertemuan kedua negara. Misalnya, pada pertemuan bilateral September 2021 menghasilkan keputusan untuk membuka jalur perbatasan Jaber-Naseeb. Pembukaan jalur perbatasan ini diharapkan dapat meningkatkan kembali kesejahteraan masyarakat sekitar. Sebelum perang, jalur tersebut sangat ramai dan menjadi penyokong nilai ekonomi keduanya. Pertemuan di bulan September dan pembukaan kembali perbatasan Jaber-Naseeb, berlanjut pada pertemuan tingkat tinggi selanjutnya, yaitu pada 3 Oktober 2021 membahas kerjasama ekonomi, energi, serta pertanian. Pembahasan kerjasama ini awalnya hanya ditujukan di sektor ekonomi dan perdagangan, kemudian berlanjut ke normalisasi penuh hubungan politik kedua negara. Hal tersebut sejalan dengan harapan Amman untuk membawa Suriah ke lingkaran Liga Arab kembali, yaitu sebelum *Arab Summit* dilaksanakan tahun 2022 mendatang (Helmy, 2021).

Yordania juga berharap untuk dapat memperbaharui pembicaraan kedua negara dalam kerjasama sumber daya air. Yordania berharap agar Suriah mau menyuplai kerajaan itu dengan air Sungai Yarmouk. Sebagai konsesinya, Yordania akan menyuplai listrik ke Suriah, serta menyuplai kebutuhan untuk merekonstruksi negara itu di bagian tenggara (The Syrian Observer, 2021). Meski begitu, sampai hari ini kerjasama di bidang sumber daya air belum menemui tahap lanjut.

Kenihilan tahap lanjut dalam kerjasama sumber daya air ini kemudian mendorong Yordania bekerjasama dengan Israel. Berdasarkan kesepakatan terbaru, kedua negara berencana membangun dan mengalirkan panel surya secara luas dari Yordania ke Israel, yaitu dengan menggunakan areal gurun pasir yang tidak terpakai di Yordania dengan mengandalkan bantuan negara-negara teluk. Adapun nantinya di Israel, panel surya tersebut digunakan sebagai penggerak listrik, untuk kemudian mendesalinasi dan mentransfer air kembali ke Yordania (Ersan, 2021). Kerjasama ini menuai demonstrasi sipil beberapa minggu terakhir di Yordania. Protes massa mayoritas muncul dari berbagai kelompok, seperti faksi Islamis, kelompok kiri, kelompok suku, dan serikat pekerja. Menurut mereka, proyek ini harus dibatalkan karena dipandang akan menjebak Yordania, serta dapat mengancam keamanan nasional bagi generasi

mendatang. Di samping itu, penolakan rakyat Yordania juga didasari atas kekerasan Israel terhadap Palestina yang belum berhenti (Al-Khalidi, 2021a).

Sekalipun Yordania telah menetapkan langkah-langkah yang tercantum dalam dokumen resminya, yang diharapkan dapat dilaksanakan juga oleh Suriah, muncul sejumlah kendala yang merintang implementasi dokumen tersebut. Pertama, harapan untuk mengurangi pengaruh Iran di Suriah terlihat mustahil terwujud. Realitas politik menunjukkan bahwa Suriah-Iran semakin dekat. Tidak hanya di level politik, melainkan juga ekonomi, agama, dan budaya. Hal ini disampaikan Dr. Raz Zimmt, ahli studi Iran di INSS (*Institute for National Security Studies*) di Universitas Tel Aviv. Zimmt memprediksi bahwa tidak akan terjadi pengurangan pengaruh Iran di Suriah dalam kurun waktu dekat. Penyebabnya karena peran Iran yang sangat besar di Suriah, khususnya dalam membantu Suriah membebaskan sebagian besar wilayahnya dari tangan teroris (Svetlova, 2021). Jika Suriah memang ingin mengurangi peran Iran, dapat dipastikan akan membutuhkan waktu dan pertimbangan khusus.

Sementara itu, Iran justru merespons positif upaya normalisasi negara Arab dengan Suriah. Iran mendukung segala upaya normalisasi yang dilakukan negara-negara Arab terhadap Suriah (Tehran Times, 2021b). Duta Besar Iran untuk Suriah, Mehdi Sobhani, mengutarakan kepada Al Ahed News, bahwa normalisasi itu tidak akan mempengaruhi relasi Iran dengan Suriah, sebab kedua negara telah berada dalam kerjasama level tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sobhani menegaskan bahwa tidak ada yang berubah dalam tujuan Barat dan aliansinya, hanya saja penggunaan taktik yang digunakan saat ini berbeda (Tehran Times, 2021a).

Kendala lainnya adalah berkaitan dengan proyek kerjasama energi, yaitu gas dan listrik, Suriah-Yordania. Menteri Perhubungan Yordania, Ghassan Al-Zamel, di Amman menyatakan bahwa Suriah-Yordania-Lebanon telah menyetujui proyek penyaluran listrik dari Yordania ke Lebanon via Suriah, namun kapan proyek itu dioperasikan masih belum jelas ditetapkan. Zamel menjelaskan, jaringan listrik di sana sudah rusak selama perang Suriah berlangsung, dan baru diperbaiki dua bulan yang lalu, sehingga beberapa kendala masih ada. Zamel menambahkan, bahwa Beirut juga masih berharap Bank Dunia segera membiayai jalannya infrastruktur proyek tersebut. Namun, sampai sekarang belum ada indikasi kesiapan terkait pendanaan. Beirut sangat mengharapkan kelancaran proyek tersebut mengingat negaranya masih dililit hutang, dan terdesak dalam level ketidakmampuan untuk membayar tunggakan sejak Maret 2020 lalu. Hal itu yang membuat ekonomi Lebanon semakin memburuk (Oweis, 2021).

Di balik beberapa kendala itu, kebijakan luar negeri Yordania dapat dinilai berhasil dari sisi munculnya dukungan dan persetujuan dua kekuatan yang berkompetisi

di Suriah, yakni Amerika Serikat dan Rusia (Al-Khalidi, 2021b). Selain itu, keberhasilan Yordania dalam upaya melanjutkan kerjasama ekonomi juga tersebar di sejumlah jangkauan lainnya, yaitu dengan dibukanya kembali perbatasan Nassib–Jaber, serta diresmikannya *Joint Free Zone* di bawah perjanjian kerjasama ekonomi kedua negara (Jordan News Agency, 2021). *Joint Free Zone* ini ditujukan untuk menerima kembali segala bentuk investasi lokal, regional, dan internasional.

Respon publik domestik atas kebijakan luar negeri Yordania terhadap Suriah umumnya pasif. Mayoritas kelompok atau faksi-faksi umum di Yordania selama ini absen dalam memberikan kecaman maupun dukungan terhadap kerjasama Yordania-Suriah. Upaya normalisasi hubungan Yordania-Suriah hampir tidak mendapat atensi publik di media lokal maupun nasional. Respons berbeda ditunjukkan publik atas kerja sama Yordania-Israel, yaitu banyak faksi yang menyatakan penolakan. Namun demikian, MoU kedua negara tetap disepakati. Terkait respons publik ini, terlihat bahwa apapun yang diputuskan pemerintah Yordania tidak selalu berkorelasi dengan kehendak rakyat. Saukani (2020) menulis, Yordania bukanlah negara yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Yordania menganut sistem monarki konstitusional dengan bentuk pemerintahan parlementer, dengan seorang raja menjadi kepala negara. Namun, meski menganut sistem monarki konstitusional dalam pemerintahannya, Yordania turut menjalankan nilai-nilai demokrasi yang diatur dalam hukum, dan menghormati hak asasi manusia serta kebebasan media dan akademik.

Saukani (2020) juga menjelaskan bahwa kelompok kepentingan di Yordania memiliki kesempatan dan pengaruh besar dalam mempengaruhi pemerintahannya, yaitu ketika memutuskan suatu kebijakan. Namun, penyampaian aspirasi kelompok-kelompok tersebut tidak sebebas dengan negara yang menganut sistem demokrasi. Saukani mengutip Yom (2014: 8) menambahkan bahwa kelompok-kelompok suku di Yordania umumnya diisi oleh suku Arab Bedouin. Mereka merupakan suku yang selama ini menopang kerajaan, paling antusias di antara para pendukung kerajaan yang lain, serta menjadi tulang punggung rezim Hashemite. Saukani turut mengutip Oudat & Alshboul (2010:70) menyebutkan bahwa bagaimanapun suku selalu terhubung dengan raja di masyarakat Yordania, alhasil legitimasi sosial raja berasal dari klaim tradisional tentang kekerabatan, agama, dan kinerja sejarah. Lebih dari itu, suku-suku tersebut juga menikmati legitimasi institusional dalam proses hukum, karena raja bekerja erat dengan suku-suku, dan dengan cara tertentu dianggap sebagai pemimpin suku.

Pada intinya, kondisi di atas mendefinisikan bahwa kekuasaan raja berhubungan dengan pengaruh kelompok suku di sana. Namun dalam beberapa hal khusus, keputusan raja dapat menjadi sebuah keputusan tetap yang tidak dapat diganggu gugat.

Hasil Kebijakan Luar Negeri Yordania terhadap Suriah

Berdasarkan data yang diperoleh dan telah dijelaskan di bagian sebelumnya, maka penulis membuat tabel analisis di bawah guna merangkum keberhasilan dan kegagalan atas kebijakan dalam dan luar negeri Yordania sebagai berikut.

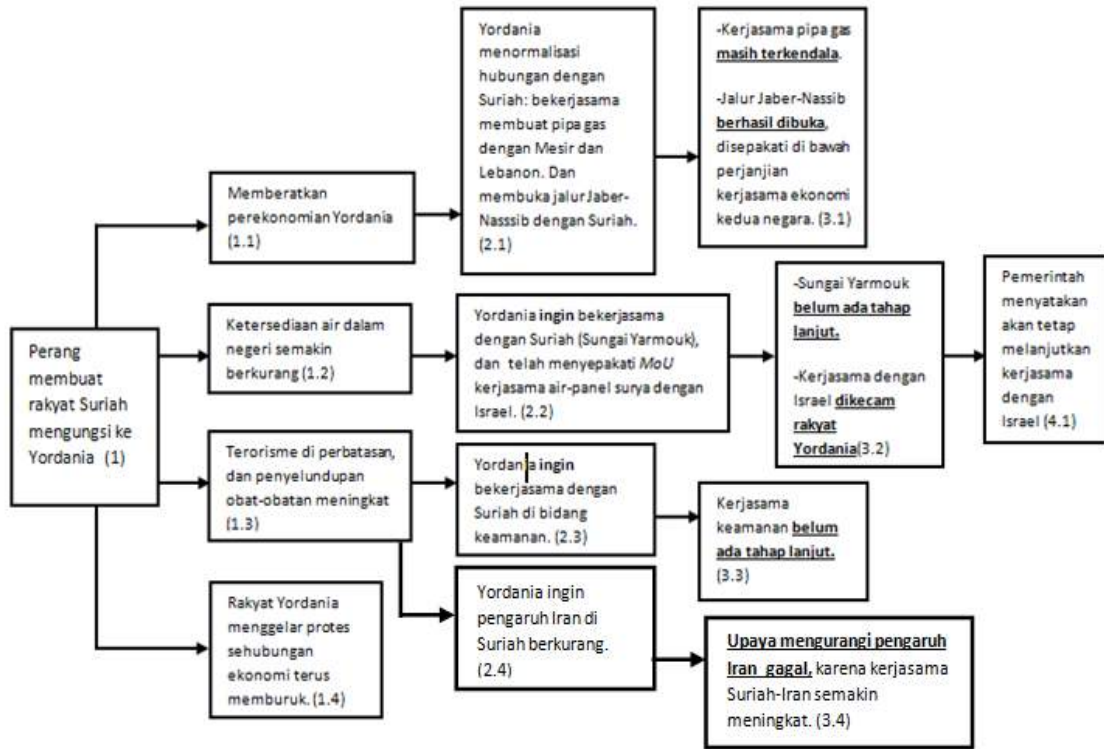
Tabel 1. Langkah Utama Yordania dalam Upaya Normalisasi dan Perealisasian UNSC 2254

Nomor	Langkah/Upaya	Berhasil	Belum Berhasil
1.→	Mengembangkan pendekatan bertahap sebagai bentuk solusi politik yang berdasarkan Resolusi UNSC 2254	√	
2.→	Mengumpulkan dukungan yang sepemikiran dari kawasan regional dan internasional (aliansi)	√	
3.→	Meminta persetujuan Rusia dalam pendekatan yang dibuat	√	
4.→	Menetapkan mekanisme untuk melibatkan rezim Suriah		√
5.→	Implementasi penuh Resolusi DK PBB 2254		√

Sumber Tabel: Analisis Penulis terhadap Langkah Utama Yordania dalam Upaya Normalisasi dan Perealisasian UNSC 2254

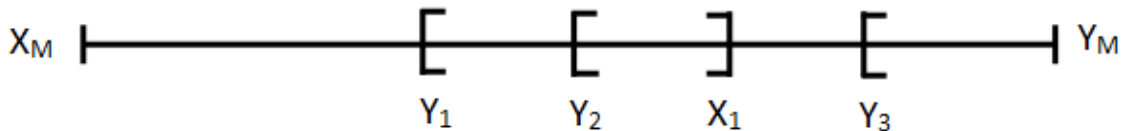
Berikutnya adalah analisis penulis terhadap seluruh kebijakan yang dikeluarkan Yordania dalam rangkaian kerjasama terhadap Suriah, beserta hasil yang diraih sekarang. Analisis tersebut penulis rangkum dalam bagan berikut ini.

Bagan 1. Analisis Langkah Spesifik Yordania dalam Kerangka Kerjasama



Sumber: Analisis Penulis terhadap Langkah Spesifik Yordania dalam Kerangka Kerjasama

Penulis menguji kebijakan luar negeri *U-turn* Yordania terhadap Suriah ini dengan menggunakan teori *two level games* oleh Robert D. Putnam, dengan rumus diagram sebagai berikut:

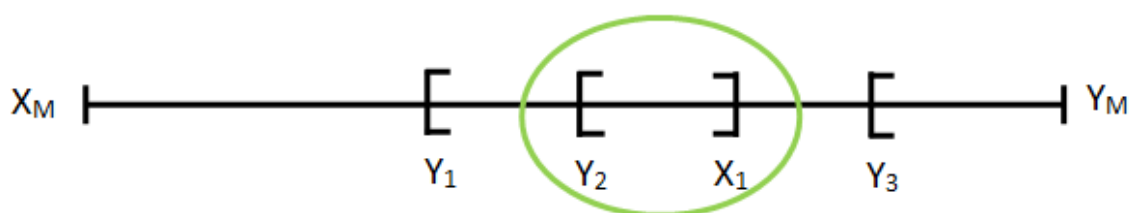


Sumber: Robert D. Putnam (1988: 441)

Rumus diagram di atas menjelaskan bahwa Y dan X adalah aktor (negara). X_M dan Y_M adalah keuntungan maksimal yang dapat diperoleh masing-masing aktor. Adapun Y_1 dan X_1 adalah keuntungan minimal yang dapat diperoleh oleh masing-masing negara. Di

antara Y_1 dan X_1 ada Y_2 . Y_2 ini dapat digambarkan sebagai perjanjian yang akan ditandatangani antar aktor ketika menghadiri suatu forum perjanjian. Jika *Win-Set* dari Y berpindah ke Y_2 , maka perjanjian masih mungkin terjadi antara Y dan X karena belum melewati ke batas minimal X yaitu X_1 . Berbeda jika kepentingan Y berpindah ke Y_3 maka kesempatan untuk membentuk perjanjian antara Y dan X mungkin tidak akan terjadi, hal ini dikarenakan Y telah melewati batas minimum X yaitu X_1 .

Rumus di atas diterapkan untuk menjelaskan keadaan tawar-menawar yang secara tidak langsung ditunjukkan dari sikap Suriah terhadap lima usulan utama yang ditetapkan Yordania, yaitu dalam upaya mengimplementasi UNSC 2254 dengan utuh. Dari rumus tersebut didapatkan hasil berikut:



Sumber: Analisis Penulis terhadap Kebijakan Luar Negeri Suriah-Yordania

Rumus di atas menggambarkan kebijakan luar negeri Suriah dalam interaksi politik luar negerinya bersama Iran terhadap Yordania. Gambar di atas menjelaskan bahwa Y adalah Yordania, sedangkan X adalah Suriah yang ingin menormalisasi hubungan diplomatik kedua negara dan kembali menjalin kerjasama di sejumlah bidang. Gambar di atas menggambarkan kepentingan minimum kedua negara Y_1 dan X_1 yaitu menormalisasi hubungan bilateral Yordania-Suriah. Namun, kebijakan Yordania dengan sebelumnya meminta persetujuan Washington di bulan Juli dan Kremlin di bulan Agustus lalu, telah menghasilkan lima langkah utama. Disebutkan bahwa Yordania akan menetapkan mekanisme guna melibatkan rezim Suriah, salah satunya berharap Suriah akan mengurangi pengaruh Iran di negaranya, dan sebagai timbal balik Amerika beserta koalisi akan keluar dari wilayah timur laut Suriah serta markas militer Al-Tanf dekat perbatasan Irak (Lucas, 2021).

Menanggapi poin tersebut Yordania (Y) dan Suriah (X) setuju untuk melanjutkan tindakannya, karena poin tersebut masih mencakup kepentingan kedua negara. Meski begitu, sehubungan dengan belum munculnya tindakan progresif dari pihak koalisi terutama untuk menepati kesepakatan keluar dari wilayah peperangan yang disepakati yaitu Al-Tanf dan timur laut Suriah, maka di sisi yang bersamaan Suriah semakin

meningkatkan intensitas kerjasamanya dengan Iran. Bahkan dilaporkan oleh Tehran Times (2021b) kerjasama kedua negara saat ini telah memasuki level tertinggi dari masa-masa sebelumnya.

Berdasarkan kebijakan Suriah tersebut dapat didefinisikan, bahwa Suriah mengambil kebijakan ini atas dasar kepentingan utamanya, yakni melihat Iran sebagai teman bekerjasama yang dapat diandalkan. Kebijakan Suriah diartikan sebagai upaya mengkalkulasikan keamanannya agar tetap mampu bertahan (*defense*) terutama di saat *Caesar Act* dan sisa terorisme masih membebani ruang ekonomi dan keamanan Suriah.

Diagram di atas juga menunjukkan bahwa sekalipun kerjasama Yordania dan Suriah masih mengalami kendala, serta kerjasama Iran-Suriah yang meningkat memberi sinyal terbalik dari kebijakan yang disepakati di awal, namun kondisi ini tidak menutup kemungkinan bagi Yordania-Suriah untuk membuat kesepakatan kembali. Sebab, kondisi Suriah saat ini belum melampaui batas minimum atas kepentingan yang diusung, yaitu jika Y_3 terjadi. Hasil kebijakan yang diperoleh rumus di atas juga tidak dapat dilepaskan dari strategi negosiator kedua negara, khususnya dalam hal ini Yordania agar dapat melobi kepentingan aliansinya. Adapun jika menimbang koalisi dalam negeri, seperti yang dipaparkan sebelumnya bahwa dalam hal ini belum tampak dukungan maupun penolakan dari faksi politik maupun kelompok suku di Yordania. Sebaliknya, kekuasaan raja masih menjadi pertimbangan utama demi kelancaran kerjasama dan normalisasi ini, baik di level domestik maupun internasional.

Simpulan

Sejak tahun 2021, setelah satu dekade berperan dalam upaya penggulingan rezim di Suriah, Yordania memutuskan untuk memutar balik (*u-turn*) kebijakan luar negerinya dengan cara melakukan upaya normalisasi diplomatik dengan Suriah. Upaya Yordania menjalin kerjasama dengan Suriah merupakan bentuk strategi bermain di banyak tempat dengan satu langkah. Dianalisis dengan teori *two level games* oleh Robert D. Putnam, ditemukan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Yordania dilakukan di tengah keterdesakannya menghadapi permasalahan domestik, yaitu keterpurukan ekonomi, salah satunya karena keberadaan pengungsi yang datang dari Suriah, masalah ketersediaan air, hingga isu keamanan.

Selain itu, terlaksananya normalisasi dan kerjasama dengan Suriah juga tidak dapat dilepaskan dari target internasional, yaitu upaya meredam pengaruh Iran di kawasan. Yordania dan Barat memiliki kepentingan untuk membawa Lebanon keluar dari pengaruh Hezbollah dan ketergantungan gas dari Iran. Menurut Yordania, jika

Suriah berhasil mengurangi keterlibatan Iran di negaranya serta mendukung rangkaian kerjasama, Suriah akan mampu keluar dari krisis, dan dapat diterima kembali di Liga Arab. Namun saat ini, hal tersebut belum dapat direalisasikan Suriah mengingat aliansi Yordania yaitu Barat belum memenuhi kesepakatan lebih dulu, sehingga yang terjadi adalah Suriah-Iran semakin mempererat kerjasamanya. Kondisi ini mendesak Yordania untuk berpikir lebih strategis dalam memutuskan kebijakan, baik terhadap pasangan kerjasamanya, Suriah, maupun implementasi kebijakan di dalam negerinya, untuk rakyat Yordania.

Saat ini kebijakan yang berhasil dilakukan Yordania masih berada di tahap awal, yaitu keberhasilan memperoleh dukungan Rusia dan Amerika; pembukaan jalur perbatasan Nassib-Jaber; pelaksanaan diskusi bilateral Suriah-Yordania dengan sejumlah negara yang terlibat kerjasama; serta disepakatinya pembentukan *Joint Free Zone* melalui Menteri Perdagangan Suriah-Yordania, ditujukan sebagai bentuk keberlanjutan kerjasama ekonomi dan regulasi pertukaran nilai dagang kedua negara.

Keberhasilan kecil Yordania dalam kerangka normalisasi ini tidak dapat dilepaskan dari faktor dalam negerinya. Khususnya keberadaan faksi sipil yang dominan mematuhi kebijakan politik kerajaan monarki ini. Meski begitu, jika Yordania ingin satu per satu masalah domestiknya berakhir, Yordania harus mempertimbangkan lebih bijak keputusan yang diambil. Sebab, misalnya dalam isu pengungsi Suriah di Yordania, mereka tidak akan pulang ke negaranya jika rekonstruksi belum sepenuhnya menjamin kehidupan. Begitu pula Suriah. Negara tersebut kemungkinan besar akan mempertahankan hubungan dengan Iran yang telah banyak membantunya selama perang melawan terorisme. Oleh sebab itu, Suriah-Yordania mesti mempertimbangkan lebih lanjut kebijakan negaranya, khususnya Yordania agar dapat memahami batas maksimum Suriah dalam bernegosiasi. Hal ini ditujukan supaya keduanya dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, yaitu demi mencapai pemenuhan Resolusi UNSC 2254.

Daftar Pustaka

- Al Arabiya News. (2012). *France Gives Non-Lethal Military Aid to Syrian Opposition: PM*. [online]. Dalam: <https://english.alarabiya.net/articles/2012/08/22/233570> [diakses 22 Desember 2021]
- Al-Khalidi, S. (2021a). Protest Jordanians against Water for Energy deal with Israel. *Nasdaq*, [online]. Dalam: <https://www.nasdaq.com/articles/jordanians-protest-against-water-for-energy-deal-with-israel> [diakses 28 November 2021].

- Al-Khalidi, S. (2021b). Jordan's Abdullah Receives first Call from Syria's Assad since Start of Conflict. *Reuters*, [online]. Dalam: <https://www.reuters.com/world/middle-east/jordans-abdullah-receives-first-call-syrias-assad-since-start-conflict-2021-10-03/> [diakses 27 Oktober 2021].
- Arraf, J. (2021). Royal Drama Unfolds in Court, but A Prince at the Center of It Is Absent. *New York Times*, [online]. Dalam: <https://www.nytimes.com/2021/06/26/world/middleeast/jordan-bassem-awadallah-trial-prince-hamzah.html> [diakses 14 November 2021].
- Asharq Al-Awsat, (2021). Secret Document for Normalization of Ties with Damascus Includes Exit of Foreign Forces. *Aawsat*, [online]. Dalam: <https://english.aawsat.com/home/article/3300336/secret-document-normalization-ties-damascus-includes-exit-foreign-forces> [diakses 14 November 2021].
- Awadallah, B, I. (2015). Jordan's Five Biggest Challenges, from ISIS to The Palestinian Question. *CNN*, [online]. Dalam: <https://edition.cnn.com/2015/06/23/opinions/jordan-five-challenges/index.html> [diakses 27 Oktober 2021].
- Bartlett, E. (2021). Western Media Quick to Accuse Syria of 'Bombing Hospitals' - But When Terrorists Really Destroy Syrian Hospitals, They Are Silent. *Reuters*, [online]. Dalam: <https://www.rt.com/op-ed/519071-syria-msm-bombing-hospitals/> [diakses 20 Oktober 2021].
- Beeley, V. (2020). As Syria Struggles Under Covid-19 Lockdown, America's Scorched Earth Policy Ensures Food Insecurity. *Mint Press*, [online]. Dalam: <https://www.mintpressnews.com/as-syria-struggles-under-covid-19-lockdown-americas-scorched-earth-policy-ensures-food-insecurity/269376/> [diakses 20 Oktober 2021].
- Dabin, B. (2021). US Occupation Continues to Loot Syrian Grain from Hasaka. *SANA*, [online]. Dalam: <http://www.sana.sy/en/?p=217135> [diakses 27 Oktober 2021].
- Department of Statistic, (2021). *External Trade*. [online] Dalam: <http://dosweb.dos.gov.jo/economic/externaltrade/> [diakses 26 November 2021].
- Ersan, M. (2021). *Jordan and Syria Put Politics Aside and Begin Rebuilding Diplomatic Links*. [online] Middle East Eye. Dalam: <https://www.middleeasteye.net/news/syria-jordan-diplomatic-ties-rebuild-politics-aside> [diakses 30 Oktober 2021].

- Griffiths, M., dkk. (2002). *International Relations: The Key Concepts Second Edition*. London and New York: Routledge Taylor and Francis Group
- Haboush, J. (2021). *US Talking to Egypt, Jordan to Help Lebanon's Fuel, Energy Needs: Senior US Diplomat*. [online] Al Arabiya. Dalam: <https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2021/08/19/US-to-help-Lebanon-with-electricity-Lebanese-presidency> [diakses 20 November 2021].
- Heller, S. (2021). Lights on in Lebanon: Limiting the Fallout from U.S. Sanctions on Syria. *War on The Rocks*, [online]. Dalam: <https://warontherocks.com/2021/11/lights-on-in-lebanon-limiting-the-fallout-from-u-s-sanctions-on-syria/> [diakses 20 November 2021].
- Helmy, N. (2021). *Chinese and Gulf States Rapprochement with Syria*. [online] Modern Diplomacy. Dalam: <https://moderndiplomacy.eu/2021/11/25/chinese-and-gulf-states-rapprochement-with-syria/amp/> [diakses 17 November 2021].
- Henkel, S, C. (2020). *The Difficult Normalisation of Relations between Arab Countries and Bashar al-Assad*. [online] SWP. Dalam: <https://www.swp-berlin.org/10.18449/2020JR01/> [diakses 16 November 2021].
- Human Right Watch, (2016). *Barriers to Education for Syrian Refugee Children in Jordan*. [online]. Dalam: <https://www.hrw.org/report/2016/08/16/were-afraid-their-future/barriers-education-syrian-refugee-children-jordan> [diakses 27 Oktober 2021].
- Ignatius, D. (2012). Looking for a Syrian Endgame. *Washington Post*, [online]. Dalam: https://www.washingtonpost.com/opinions/david-ignatius-syria-approaches-the-tipping-point/2012/07/18/gJQAFoCvtW_story.html [diakses 16 November 2021].
- Jordan News Agency, (2021). *Jordanian-Syrian Joint Free Zone Reopened Today*. [online] Dalam: https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=39325&lang=en&name=en_news [diakses 21 November 2021].
- Kilani, A. (2021). *Jordan's Diplomacy in Syria, Part 1*. [online] Mews Line Institute. Dalam: <https://newlinesinstitute.org/syria/jordans-diplomacy-in-syria-part-1/> [diakses 28 Oktober 2021].
- Krasna, J. (2021). Jordan: With Relations with Washington and Jerusalem back in Order, a Flurry of Diplomatic Activity. *Jurnal Tel Aviv Notes*, [online]. Dalam:

<https://dayan.org/content/jordan-relations-washington-and-jerusalem-back-order-flurry-diplomatic-activity> [diakses 20 November 2021].

Lister, C. (2021). Biden's Inaction on Syria Risks Normalizing Assad and His Crimes. *Foreign Policy*, [online]. Dalam: <https://foreignpolicy.com/2021/10/08/biden-syria-policy-assad-war-crimes/> [diakses 18 November 2021].

Lucas, S. (2021). Report: Jordan's Plan for Normalization with Assad-Iran Curbed in Syria, US to Withdraw, Russia Bolstered. *EAWorld View*, [online]. Dalam: <https://eaworldview.com/2021/11/jordan-normalization-assad-syria-iran-us-russia/> [diakses 28 November 2021].

Mazzetti, M., Goldman, A., & Schmidt. (2017). Behind the Sudden Death of a 1\$ Billion Secret C.I.A. War in Syria. *New York Times*, [online]. Dalam: <https://www.nytimes.com/2017/08/02/world/middleeast/cia-syria-rebel-arm-train-trump.html> [diakses 20 Desember 2021].

Mousa, B. (2014). *Syrian Expatriates Launch Project to Offer Psychological Support for Children In Syria*. [online] SANA. Dalam: <http://sana.sy/en/?p=10036> [diakses 27 Oktober 2021].

Oudat, M. A., dan Alshboul, A. (2010). "Jordan First": Tribalism, Nationalism and Legitimacy of Power in Jordan. *Intellectual Discourse*, 18, 65-96.

Oweis, K, Y. (2021). Syria Minister Says Electricity Line with Jordan Being Repaired. *The National News*, [online]. Dalam: <https://www.thenationalnews.com/mena/jordan/2021/10/06/syrian-minister-says-electricity-line-with-jordan-being-repaired/?outputType=amp> [diakses 16 November 2021].

Prabowo, A. (2018). *Kebijakan Indonesia dalam Menangani Pengungsi Rohingya Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo (2014–2016)*. [online] UII. Dalam: <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11794> [diakses 14 November 2021].

Putnam, R, D. (1988). *Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two Level Games*. Cambridge: The MIT Press

Rozoff, R. (2012). *Are Turkey and NATO Contemplating A Military Intervention Against Syria Ahead the Chicago Summit?* [online] Global Research. Dalam: <https://www.globalresearch.ca/are-turkey-and-nato-contemplating-a-military-intervention-against-syria-ahead-of-the-chicago-summit/30328> [diakses 27 Oktober 2021].

- Sanchez, V, S. (2021). *Normalization with Syria 'a Breakthrough' for Jordan's Regional Role*. [online] Amwaj Media. Dalam: <https://amwaj.media/article/normalisation-with-assad-how-it-impacts-jordan-s-ties-with-ksa-and-the-uae> [diakses 20 November 2021].
- Saukani, M, I. (2020). *Konsistensi Kebijakan Yordani Untuk Tetap Menawarkan Solusi Dua Negara dalam Konflik Israel-Palestina*. [online] UII. Dalam: <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/28434> [Diakses 23 Agustus 2021].
- Sharif, O, Al. (2021a). *Is Jordan's Energy Diplomacy a Step Towards Normalising Syria's Regime?* [online] English Al Araby. Dalam: <https://english.alaraby.co.uk/analysis/jordans-energy-diplomacy-gateway-normalising-assad?amp> [diakses 20 November 2021].
- Sharif, O, Al. (2021b). *Why Washington has Provided King Abdullah with Political Cover to Engage the Assad Regime*. [online] Mei@75. Dalam: <https://www.mei.edu/publications/why-washington-has-provided-king-abdullah-political-cover-engage-assad-regime> [diakses 20 Desember 2021].
- Southfront, (2021). *Military Situation in Syria on December 1, 2021 (Map Update)*. [online]. Dalam: <https://southfront.org/military-situation-in-syria-on-december-1-2021-map-update/> [diakses 2 Desember 2021].
- Sulaeman, D, Y. (2017). *Salju di Aleppo*. Jakarta Selatan: PT Mitra Media Mustika dan ICMES Publisher
- Svetlova, K. (2021). *Can the Arab Countries Squeeze Iran Out of Syria?* [online] The Media Line. Dalam: <https://themedialine.org/top-stories/can-the-arab-countries-squeeze-iran-out-of-syria/> [diakses 27 November 2021].
- Sweis, R, F. (2021). *Resentment Grows Against Syrian Refugees in Jordan*. *New York Times*, [online]. Dalam: <https://www.nytimes.com/2013/05/09/world/middleeast/09iht-m09-jordan-syria.html> [diakses 28 Oktober 2021].
- Tehran Times. (2021a). *Iran–Syria Cooperation Continues at Highest Level: Ambassador*. [online]. Dalam: <https://www.tehrantimes.com/news/467465/Iran-Syria-cooperation-continues-at-highest-level-ambassador> [diakses 26 November 2021].
- Tehran Times. (2021b). *Iran-Syria Ties Stronger Than Ever*. [online]. Dalam <https://www.tehrantimes.com/news/467277/Iran-Syria-ties-stronger-than-ever> [diakses 26 November 2021].

- The Free Press Journal. (2021). *Huge Protests in Amman against Jordan–Israel Solar Power for Water Deal*. [online]. Dalam: <https://www.freepressjournal.in/amp/world/huge-protests-in-amman-against-jordan-israel-solar-power-for-water-deal> [diakses 1 Desember 2021].
- The Syrian Observer. (2021). *Why Jordan is Pushing to Normalize Ties with the Syrian Regime*. [online]. Dalam: <https://syrianobserver.com/features/68630/why-jordan-is-pushing-to-normalise-ties-with-the-syrian-regime.html> [diakses 16 November 2021].
- Tokmajyan, A. (2021). *Thwarting Jordan’s Bahhara Trade with Syria Risks Social Unrest in Ramtha*. [online] Carnegie MEC. Dalam: <https://carnegie-mec.org/2021/04/19/thwarting-jordan-s-bahhara-trade-with-syria-risks-social-unrest-in-ramtha-pub-84351> [diakses 12 Oktober 2021].
- United Nations. (2015). *Security Council Unanimously Adopts Resolution 2254 (2015), Endorsing Road Map for Peace Process in Syria, Setting Timetable for Talks*, [online]. Dalam: <https://www.un.org/press/en/2015/sc12171.doc.htm> [diakses 15 November 2021]
- US Department of State. (2020). *Caesar Syria Civilian Protection Act*. [online]. Dalam: <https://2017-2021.state.gov/caesar-syria-civilian-protection-act/index.html> [diakses 22 Desember 2021]